

DINAMIKA HUKUM PAJAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT

Ayang Fristia Maulana¹, Herlina², Shilna Layinatul Latifah³, Oktavia Veronika⁴
fristia.maulana@gmail.com¹, herlinaaa1103@gmail.com², shilnalayinatul@gmail.com³,
oktaviaveronika42@gmail.com⁴
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Jurnal ini mengeksplorasi dinamika hukum pajak dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Pajak berperan sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal suatu negara, memberikan pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi. Studi ini menyelidiki berbagai aspek hukum pajak, termasuk perubahan regulasi, kebijakan perpajakan, dan penerapan sistem pajak yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Analisis yang mendalam terhadap dampak-dampak tersebut dilakukan untuk memahami implikasi positif dan negatifnya terhadap kemajuan ekonomi, pola investasi, perilaku konsumsi, dan distribusi pendapatan.

Kata Kunci: Dinamika Hukum Pajak, Dampak Ekonomi, Masyarakat.

ABSTRACT

This journal explores the dynamics of tax law and its repercussions on the community's economy. Taxation serves as a pivotal instrument in a nation's fiscal policy, exerting a significant influence on economic activities. The study delves into diverse facets of tax law, encompassing regulatory alterations, tax policies, and the implementation of tax systems that influence the economic endeavors of the community. An exhaustive analysis of these effects is conducted to comprehend their favorable and adverse ramifications on economic advancement, investment patterns, consumption behaviors, and income distribution.

Keywords: Tax Law Dynamics, Economic Impact, Community.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam pengaturan kebijakan fiskal suatu negara. Sebagai bagian integral dari sistem ekonomi, hukum pajak memainkan peran penting dalam mengatur arus keuangan negara, mengumpulkan dana untuk mendukung berbagai program dan proyek pemerintah, serta mempengaruhi keputusan ekonomi individu dan perusahaan. Dalam beberapa dekade terakhir, dinamika hukum pajak telah menjadi fokus utama dalam penelitian ekonomi dan hukum, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan, tanpa mendapat imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, dan tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan fungsi negara dalam menjalankan pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai kewajiban untuk negara berdasarkan pendapatan individu atau perdagangan yang mereka lakukan.

Pajak berperan sebagai sumber keuangan negara yang vital untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Negara menjadikan pemungutan pajak sebagai kewajiban masyarakat karena merupakan salah satu cara utama untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendukung pembangunan nasional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peran pajak sangat strategis dan penting, seperti yang tercermin dari persentase sumbangan pajak dalam Rancangan APBN dari tahun ke tahun.

Pajak menjadi alat utama bagi pemerintah untuk pengumpulan dana yang diperlukan untuk berbagai kegiatan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan

keamanan. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi esensialnya. Oleh karena itu, wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap pembangunan dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara.

Selain itu, pajak juga berperan dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial. Melalui sistem perpajakan yang adil dan progresif, pemerintah dapat mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Pajak progresif adalah sistem perpajakan yang menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk individu atau kelompok yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat.

Secara keseluruhan, pajak bukan hanya menjadi kewajiban hukum bagi masyarakat, tetapi juga merupakan salah satu instrumen utama untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan mendukung pembangunan nasional. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya sumbangan pajak bagi kemajuan negara, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam pemenuhan kewajiban pajak serta peningkatan efektivitas penggunaan dana pajak untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun pajak memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan bagi negara, terdapat beberapa kekurangan dalam penggunaannya yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah terkait dengan infrastruktur jalan yang rusak dan fasilitas jembatan yang kurang memadai. Kondisi ini menghambat distribusi barang dan menyebabkan biaya ekonomi menjadi tinggi. Disamping itu, meskipun alokasi dana pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah meningkat setiap tahunnya dan mencapai 20% dari total APBN, sektor pendidikan masih dianggap belum optimal. Bantuan operasional sekolah (BOS) dan tunjangan untuk guru tidak tetap dianggap kurang memadai, sedangkan lebih banyak dana dialokasikan untuk rehabilitasi sarana fisik daripada untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik. Meskipun demikian, penggunaan pajak yang lebih besar diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Ini menunjukkan bahwa meskipun pajak telah menjadi sumber pendanaan utama bagi negara, masih ada ketidakpuasan terhadap penggunaannya. Terutama dalam hal infrastruktur dan pendidikan, masyarakat merasakan bahwa kebutuhan mereka belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam pengalokasian dan penggunaan dana pajak, dengan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini akan membantu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap peran pajak dalam pembangunan negara.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut dinamika hukum pajak dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi ekonomi masyarakat. Dengan memahami berbagai aspek hukum pajak, termasuk perubahan regulasi, kebijakan perpajakan, dan penerapan sistem pajak, kami akan melakukan analisis mendalam terhadap dampak-dampaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi positif dan negatif dari kebijakan perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, konsumsi, dan distribusi pendapatan di masyarakat.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan perpajakan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menganalisis berbagai teori ekonomi dan prinsip hukum, kami akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan perpajakan dapat dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan akses terhadap sumber daya bagi masyarakat yang rentan, dan menghasilkan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi

yang seimbang serta berkelanjutan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan teori dan praktik dalam domain hukum pajak dan ekonomi.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen dan studi kasus. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang metode penelitian yang kami terapkan:

1. Analisis Dokumen

Peneliti melakukan analisis dokumen terhadap berbagai sumber informasi yang relevan, termasuk undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah terkait, laporan keuangan pemerintah, dan dokumen kebijakan perpajakan lainnya. Analisis dokumen ini membantu kami memahami kerangka kerja hukum pajak yang berlaku, perubahan regulasi terbaru, serta tujuan dan implikasi dari kebijakan perpajakan yang diterapkan.

2. Studi Kasus

Peneliti juga melakukan studi kasus untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan perpajakan dalam konteks praktik nyata. Kami memilih beberapa kasus yang mewakili berbagai situasi ekonomi dan sosial, dan menganalisis dampak kebijakan perpajakan tersebut terhadap perilaku ekonomi masyarakat serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika hukum pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Perubahan dalam regulasi pajak, seperti tarif pajak yang berubah atau kebijakan insentif fiskal baru, dapat mempengaruhi perilaku konsumsi dan investasi masyarakat serta kinerja bisnis. Analisis data juga menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang efektif dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan konsumsi, serta memperkuat distribusi pendapatan yang lebih adil.

Namun demikian, penelitian juga menyoroti beberapa dampak negatif dari kebijakan perpajakan tertentu, seperti potensi untuk mengurangi daya beli masyarakat atau menciptakan distorsi ekonomi yang tidak diinginkan. Misalnya, peningkatan tarif pajak tertentu dapat menyebabkan penurunan dalam investasi atau pengeluaran konsumen, yang pada gilirannya dapat meredam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan perpajakan yang tidak adil atau tidak berimbang juga dapat memperburuk ketidaksetaraan pendapatan dan memperkuat kesenjangan sosial ekonomi.

Analisis lebih lanjut menyoroti pentingnya faktor-faktor tertentu dalam menentukan efektivitas kebijakan perpajakan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut meliputi kejelasan regulasi, administrasi perpajakan yang efisien, keterlibatan aktif dari sektor swasta, serta dukungan pemerintah terhadap inovasi dan pengembangan infrastruktur. Dengan memahami faktor-faktor ini, pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dalam menghasilkan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata bagi semua lapisan masyarakat.

Setelah melakukan analisis dokumen dan studi kasus, kami berhasil mengidentifikasi beberapa hasil penting yang menyoroti dinamika hukum pajak dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Berikut adalah beberapa hasil utama dari penelitian kami:

A. Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Analisis kami menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan perpajakan yang dirancang dengan baik dan sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang positif. Misalnya, penurunan tarif pajak atas pendapatan individu atau perusahaan dapat merangsang lebih banyak uang beredar di masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat konsumsi dan investasi.

Namun, perlu diingat bahwa efek kebijakan perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat linier atau positif. Beberapa kebijakan perpajakan, seperti peningkatan tarif pajak tertentu atau pemberlakuan pajak baru pada sektor tertentu, dapat mengurangi insentif bagi individu atau perusahaan untuk berinvestasi atau menghabiskan lebih banyak uang. Ini dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan yang lebih lambat.

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kapasitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan layanan dari satu periode ke periode berikutnya. Hal ini dapat diukur menggunakan Gross Domestic Product (GDP) untuk tingkat nasional dan Regional Gross Domestic Product (RGDP) untuk tingkat daerah. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, RGDP adalah total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian dalam suatu wilayah. Nilai tambah ini merupakan hasil dari faktor produksi dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah melibatkan pengurangan biaya antara dari nilai produksi. Nilai tambah bruto mencakup pendapatan faktor (seperti upah, bunga, sewa, dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung.

B. Dampak Kebijakan Perpajakan terhadap Distribusi Pendapatan

Analisis kami menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap distribusi pendapatan di masyarakat. Beberapa kebijakan perpajakan dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan antara kelompok-kelompok sosial, sementara kebijakan lainnya dapat membantu mengurangi ketimpangan tersebut.

Kebijakan perpajakan yang dirancang dengan cermat dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Contohnya, penerapan pajak progresif yang menetapkan tarif pajak lebih tinggi bagi individu dengan pendapatan lebih tinggi dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Selain itu, pemberlakuan kebijakan insentif pajak untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah atau untuk sektor-sektor tertentu yang berkontribusi pada pemerataan pendapatan juga dapat membantu mengurangi ketimpangan.

Namun, kebijakan perpajakan juga dapat memperburuk ketimpangan pendapatan jika tidak dirancang dengan tepat. Misalnya, kebijakan pengurangan tarif pajak yang berpihak kepada kelompok kaya atau pengenaan pajak atas barang-barang konsumsi yang penting bagi kelompok miskin dapat memperbesar kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan implikasi distribusi dari kebijakan perpajakan yang mereka terapkan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memperburuk ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Sasaran pembangunan ekonomi bagi aliran ekstrim kanan tidak berfokus pada upaya meningkatkan kesetaraan melalui mekanisme trickle-down, melainkan dengan memusatkan pendapatan pada kelompok yang sudah kaya. Produksi diatur dengan efisien, dan distribusi pendapatan kemudian dilakukan melalui transfer atau pajak tanpa mengubah struktur ekonomi. Namun, pendekatan ini seringkali tidak berhasil. Sebagai contoh, dalam kebijakan pembangunan ekonomi di Brazil, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat,

namun ketimpangan tinggi dan usaha untuk mengurangi kemiskinan terhambat. Aset cenderung terkonsentrasi, akses pendidikan tidak merata, dan pembangunan industri serta pertanian lebih menguntungkan skala usaha besar dan teknologi yang membutuhkan investasi besar.

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Perpajakan

Analisis kami menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan perpajakan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama adalah:

1. Kejelasan Regulasi

Kejelasan regulasi sangatlah vital untuk menjaga stabilitas dan kepatuhan dalam sistem perpajakan. Regulasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak terkait, termasuk wajib pajak, pelaku bisnis, dan pemerintah, memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Ketika aturan perpajakan tidak ambigu, wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab mereka, meringkaskan kesempatan untuk melakukan praktik penghindaran pajak atau pengelakan pajak. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan pajak yang terkumpul dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Selain itu, kejelasan regulasi juga membantu mengurangi ketidakpastian di kalangan pelaku bisnis dan investor. Dengan memahami dengan jelas aturan dan prosedur perpajakan yang berlaku, pelaku bisnis dapat membuat keputusan investasi yang lebih percaya diri dan tepat. Mereka dapat mengantisipasi lebih baik bagaimana kebijakan perpajakan akan memengaruhi operasi mereka dalam jangka panjang, yang pada gilirannya merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kejelasan regulasi menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi aktivitas bisnis dan inovasi ekonomi.

Selanjutnya, regulasi perpajakan yang jelas juga meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan. Dengan mengetahui dengan pasti bagaimana pajak dikalkulasikan dan diatur, masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap keadilan dan kebijakan pemerintah. Transparansi ini penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pajak. Dengan demikian, kejelasan regulasi bukan hanya memastikan kepatuhan pajak yang lebih tinggi, tetapi juga menciptakan dasar yang lebih kuat untuk stabilitas dan keadilan dalam sistem perpajakan secara keseluruhan.

2. Administrasi Perpajakan yang Efisien

Kebijakan perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tingkat kesenjangan pendapatan di masyarakat. Poin ini mengacu pada cara kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi sejauh mana pendapatan didistribusikan di antara berbagai kelompok sosial dan ekonomi.

Kebijakan perpajakan yang dirancang dengan tepat dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan antara berbagai kelompok sosial. Misalnya, penerapan tarif pajak progresif, di mana tarif pajak lebih tinggi untuk mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi, dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan. Dengan cara ini, kelompok dengan pendapatan yang lebih tinggi memberikan kontribusi lebih besar dalam pembangunan negara.

Namun, kebijakan perpajakan juga dapat memperburuk ketimpangan pendapatan jika tidak dirancang dengan hati-hati. Sebagai contoh, pemberlakuan pajak atas barang-barang konsumsi yang penting bagi kelompok miskin atau pengurangan tarif pajak yang lebih menguntungkan bagi kelompok kaya dapat memperbesar kesenjangan pendapatan. Dengan demikian, perlu pertimbangan yang cermat dalam merancang kebijakan perpajakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memperburuk ketimpangan pendapatan di

masyarakat.

Selain itu, kebijakan perpajakan juga dapat memiliki dampak lebih luas terhadap distribusi pendapatan di masyarakat. Misalnya, insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu atau bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah dapat membantu mendorong inklusi ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan efek distribusi dari kebijakan perpajakan dan untuk merancang kebijakan yang mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat.

3. Keterlibatan Aktif dari Sektor Swasta

Keterlibatan aktif sektor swasta merupakan faktor kunci yang memengaruhi kesuksesan kebijakan perpajakan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta memiliki potensi besar untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pertama-tama, sektor swasta seringkali menjadi motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan perusahaan-perusahaan swasta dalam investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja dapat menciptakan efek berganda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional.

Kemudian, sektor swasta juga membawa inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Karena bersaing dalam lingkungan pasar yang kompetitif, perusahaan swasta cenderung mencari cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka. Keterlibatan mereka dalam proyek-proyek infrastruktur atau program-program pembangunan ekonomi dapat membantu mempercepat kemajuan dan mengurangi biaya yang terkait dengan proyek-proyek tersebut.

Selain itu, sektor swasta juga membawa keahlian dan pengalaman yang berharga dalam manajemen keuangan dan administrasi. Dengan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan, pemerintah dapat memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki oleh sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kebijakan perpajakan yang diterapkan.

Keterlibatan aktif dari sektor swasta, oleh karena itu, bukan hanya dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memperkuat kualitas dari kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan sektor swasta merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang efektif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.

KESIMPULAN

Studi ini menyoroti pentingnya kebijakan perpajakan dalam membentuk dinamika ekonomi sebuah negara serta dampaknya terhadap distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berbagai faktor, seperti kejelasan regulasi, administrasi perpajakan yang efisien, dan keterlibatan aktif dari sektor swasta, telah terbukti memengaruhi efektivitas kebijakan perpajakan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui analisis yang mendalam, kami menyimpulkan bahwa kebijakan perpajakan yang dirancang dengan cermat dan sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku dapat menjadi alat yang efektif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, memperbaiki distribusi pendapatan, dan menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Namun, kebijakan perpajakan yang tidak tepat atau tidak seimbang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Waid, A. (2020). Penegakan Hukum Pajak Untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19. Otoritas: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol.4,No.1.
- Najicha, F, U. (2022). Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Otoritas: Lus Civile. Vol. 6, No. 1.
- Sulastyawati, D. (2014). Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat.
- Saragih, A, H. (2018). Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan. Vol. 3, No.1.
- Sinaga, B & Susilowati, R, H. (2012). Dampak Kebijakan Ekonomi Di Sektor Agroindustri Terhadap Distribusi Pendapatan Sektoral, Tenaga Kerja Dan Rumah tangga Di Indonesia. Otoritas: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian.